

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Barat merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat (SKPD) yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi dan membuat pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugas bidang pendidikan pada Provinsi Sumatra Barat. Sebagai sebuah organisasi tercapainya visi dan misi, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Barat ditentukan oleh kerjasama antara seluruh sistem organisasi, bidang staf, dan unit pelaksana teknis yang telah dibentuk berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Tugas pokok yang dilakukan untuk mengelola proses pendidikan, seperti memasukan data, memprosesnya dan membuat laporan berapa banyak sekolah yang dibutuhkan dan dikelola. Termasuk fasilitas yang ada didalamnya, berapa banyak guru yang ada, berapa jumlah murid yang belajar di sekolah dan bagaimana kondisinya, bagaimana juga kurikulum mata pelajaran yang diajarkan, serta bagaimana laporan laporan penggunaan dari anggaran keuangan-keuangan yang diberikan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut tentunya tidak lepas dari berbagai macam kendala yang menghambat proses pendidikan. Hambatan ini dapat muncul dari dalam dinas maupun dari luar lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Berfokus kepada tugas pokok, pada bagian penganggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan sangat teliti

karna pada bagian inilah terjadinya serangkain proses penganggaran dan perencanaan keuangan.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 sebagai acuan dalam menyusun dan melaksanakan anggaran oleh Pemerintah Daerah Provinsi Atau Kabupaten Dan Kota. Penyusunan ini harus dilakukan dengan benar agar penggaran dapat berjalan lancar tanpa hambatan. Tujuan dari pelaksanaan anggaran yaitu sebagai dasar hukum untuk menentukan sumber dan investasi dana, melakukan batasan total dana yang dicari dan dipakai, serta sebagai penyempurnaan terhadap rancangan yang sudah dirancang.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Anggaran diartikan sebagai taksiran atau perkiraan biaya selanjutnya yang akan diterima dan dikeluarkan. Menurut Rudianto (2009) Anggaran merupakan sebuah rancangan kerja dalam organisasi untuk waktu yang akan datang dan dalam bentuk kuantitatif, formal, serta berurutan. Anggaran itu sendiri merupakan sebuah perencanaan yang ditulis tentang aktvitas yang dilakukan oleh sebuah organisasi secara kuantitatif dan disebut dalam satuan uang yang dipakai pada rentang waktu tertentu. Pada rentang waktu ini lah tak semua anggaran dapat dipenuhi dengan Uang Persediaan(UP) yang telah ditetapkan, maka akan diajukanya dokumen oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang yang disingkat SPP-GU, merupakan dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan. Hal ini dilakukan saat anggaran tidak dapat dipenuhi oleh uang persedian.

Metode pembayaran untuk mekanisme GU ini dilakukan dengan sistem pembayaran non tunai (*non cash*), dimana mekanisme Dalam alur SOP pertanggungjawaban GU, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat khususnya dibagian Subag Keuangan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Dengan adanya SOP ini proses GU diharapkan sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan, hanya saja dalam pelaksanaannya masih adanya kendala yang menghambat proses penganggaran. Hal ini terjadi karna adanya anggaran yang belum direkap atau kurangnya kelengkapan persyaratan yang dibutuhkan oleh bendahara pengeluaran. Sehingga dapat menghambat proses penganggaran. Oleh karna itu, penulis tertarik untuk menjelaskan lebih rinci lagi mengenai kendala dalam pengajuan anggaran tersebut, dengan menyusun laporan tugas akhir berjudul **“ANALISIS KENDALA PENGAJUAN SPP-GU (GANTI UANG) PADA BIDANG PENGAGGARAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, persoalan yang akan dibahas oleh penulis ialah bagaimana kendala dalam mengajukan SPP-GU(Ganti Uang) serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui kendala yang terjadi saat pengajuan SPP-GU (Ganti Uang) serta mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari kegiatan magang ini adalah:

1. Bagi penulis dan mahasiswa

Bagi penulis dan mahasiswa laporan ini dapat menambah ilmu dan pengetahuan mengenai kendala dalam pengajuan SPP-GU (Ganti Uang)

2. Bagi instansi

Sebagai referensi dan penyedia informasi bagi instansi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

3. Bagi khalayak umum

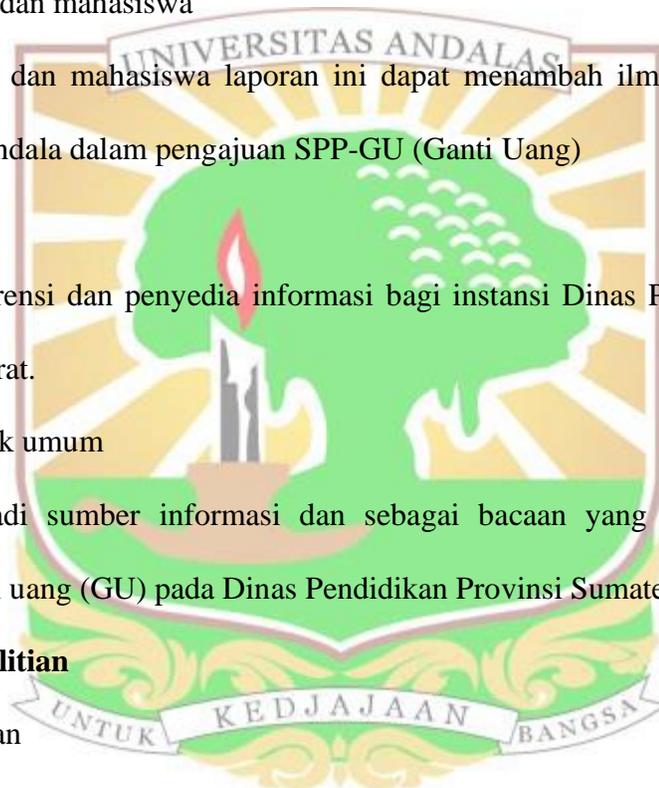
Dapat menjadi sumber informasi dan sebagai bacaan yang memuat SOP dan kendala ganti uang (GU) pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

1.5 Metode Penelitian

1. Studi lapangan

Metode pertama yang penulis lakukan adalah melakukan pengamatan dan wawancara langsung ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang hendak dibahas.

2. Penggunaan internet



Ini dilakukan untuk melengkapi data-data yang dapat dicari melalui situs-situs dan website resmi

3. Studi Kepustakaan

Metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi yang tepat dengan pembahasan yang berhubungan dengan kendala dalam pengajuan SPP-GU sesuai dengan pembahasan pada laporan magang yang diperoleh melalui buku-buku ilmiah, laporan penelitian, dan berbagai sumber lainnya.

1.6 Tempat dan Waktu Penelitian

Kegiatan magang akan dilaksanakan pada dinas pendidikan provinsi Sumatra barat,yang beralamat di Jl. Jend Sudirman No. 52,Jati Baru,Kec. Padang Timur.Kota Pada Sumatera Barat.Kegiatan ini dilaksanakan selama 40 hari kerja.

1.7 Sistematika Penelitian

Agar dapat dengan mudah dimengerti ini beberapa penjelasan singkat penulisan yang terdiri dari lima bab,yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, metode penulisan, tempat waktu dan kegiatan serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas teori mengenai kendala pengajuan SPP-GU(Ganti Uang) pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Barat.

BAB III GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum instansi dinas pendidikan yang terdiri dari sejarah dan perkembangan instansi, visi dan misi, gambaran umum instansi, struktur organisasi dan tugas dari masing masing bidang kerja instansi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Barat.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai kendala dalam pengajuan SPP-GU (Ganti Uang) Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Barat.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan keseluruhan pembahasan dan dilengkapi dengan saran-saran yang dapat membangun dan berguna untuk pembaca dan masyarakat.



